



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

OPTIMALISASI TATA KELOLA PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA): PILAR PENINGKATAN EKONOMI DESA

Fadiyah Suci Rahmadini¹, Susi Hardjati^{* 2}

^{1,2}, Program Studi Administrasi Publik, FISIP,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*Email Corresponding : fadiyahsuci13@gmail.com

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Article history:

Received date: 10 November 2024

Revised date: 16 November 2024

Accepted date: 30 November 2024

The purpose of the research is to understand and analyze the Governance Model of the BUMDes Simo Djojo Makmur Development. The data analysis technique employed in this study is the interactive model of analysis. Based on the research findings, it can be concluded that BUMDes Simo Djojo Makmur has effectively implemented the cooperative principle in the Longan Orchard Tourism by establishing good collaboration between the BUMDes management, the village government, the community, and third parties such as BNI46 agents and academic institutions. BUMDes Simo Djojo Makmur has also successfully adopted the emancipatory principle in several aspects of BUMDes management. Furthermore, BUMDes has applied the accountable principle by being responsible for financial management, as evidenced by the routine financial reports and administrative documents submitted twice a year, including Profit and Loss Statements, Balance Sheets, Cash Flow Statements, and other relevant financial documents. The sustainable principle has been applied through word-of-mouth marketing among the village community and visitors, resulting in a steady increase in tourist visits each year. Additionally, BUMDes has practiced the participatory principle, as seen from the support from both the government and the community, which has contributed to increasing the village's original income. Lastly, BUMDes has implemented the transparency principle by clearly and easily providing information on financial activities and operations to the village government and the community..

Keywords: BUMDes and village original income.

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan mengevaluasi Model Tata Kelola Pengembangan BUMDes Simo Djojo Makmur. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian, BUMDes Simo Djojo Makmur telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip koperasi dalam pariwisata Kelengkeng dengan membangun hubungan yang positif antara pengelola dengan masyarakat, pemerintah desa, dan pihak luar seperti perguruan tinggi dan agen BNI46. Dalam beberapa hal, BUMDes Simodjojo Makmur telah menerapkan konsep emansipatoris secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan keuangan dan administrasi yang dibuat secara berkala dua kali setahun, yang mencakup akuntabilitas dalam laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan lain-lain. BUMDes telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mempertanggungjawabkan keuangannya. Agar kunjungan wisatawan terus meningkat setiap tahunnya, BUMDes memadukan praktik berkelanjutan dengan promosi dari mulut ke mulut antara masyarakat setempat dengan wisatawan. Untuk mendongkrak pendapatan awal desa, BUMDes telah menerapkan konsep partisipatif, yang dibuktikan dengan adanya dukungan masyarakat dan pemerintah. Dengan memberikan informasi yang jelas dan dapat diakses secara bebas kepada dewan desa dan masyarakat tentang pelaksanaan operasi keuangan, BUMdes telah mewujudkan gagasan transparansi.

Kata kunci : bumdes dan pendapatan asli desa.

PENDAHULUAN

Dasar hukum pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan tersebut diatur pada pasal 213 ayat (1) bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. (Ayuningtyas, 2022)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan entitas milik dan dikelola oleh masyarakat desa Keberhasilannya sangat bergantung pada semangat kolektif masyarakat desa dalam mendukung operasional dan pengembangannya. Idealnya, BUMDes tidak hanya berperan sebagai lembaga sosial, tetapi juga sebagai pilar ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu, tata kelola yang baik menjadi elemen krusial untuk memastikan bahwa BUMDes beroperasi secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, tanpa ketergantungan terhadap anggaran tahunan semata. Untuk itu, Kementerian Desa dan pihak terkait perlu merancang strategi yang tidak hanya menjadikan BUMDes sebagai institusi produktif dan bermanfaat, tetapi juga mampu berdiri secara mandiri (Jumaiyah et al., 2019).

Dalam pengembangan BUMDesa, tata kelola yang baik menjadi elemen krusial untuk memastikan bahwa badan usaha ini bukan hanya menjadi proyek atau kegiatan tahunan yang bersifat sementara tanpa kesinambungan. Kementerian Desa memiliki peran penting dalam memberikan arahan, pendampingan, serta pengawasan yang diperlukan agar BUMDesa dapat mempertahankan produktivitas dan kemandiriannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun strategi berkelanjutan yang tidak bergantung sepenuhnya pada alokasi anggaran tahunan, sehingga kelangsungan operasional BUMDes tetap terjamin, bahkan di tengah dinamika perubahan kepemimpinan nasional. Keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh statusnya sebagai lembaga sosial, tetapi juga oleh kemampuannya sebagai institusi ekonomi yang mampu memenuhi keperluan atau kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu, tata kelola yang baik berfokus pada prinsip-prinsip kepemilikan dan

pengelolaan yang berbasis masyarakat, sehingga semangat kolektif dan partisipasi aktif masyarakat desa dapat dimanfaatkan sebagai kunci utama untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat posisi BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Pemberdayaan yang diberikan oleh pihak pemerintah desa harus dirancang dengan tujuan mencapai masyarakat desa yang sejahtera. Dalam konteks ini, tata kelola yang baik akan mencakup mekanisme untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait BUMDes. Dengan demikian, BUMDes dapat menjadi lebih dari sekadar lembaga sosial, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan. (Ihsan & Setiyono, 2018)

Peran pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merealisasikan pemberdayaan bermula dari tahapan menyiapkan, menilai, merancang juga pemformulasian program, pelaksanaan program, dan evaluasi, serta terminasi. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Desa yang menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah “Penyelenggara urusan dan kepentingan pemerintahan dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, masyarakat harus dilibatkan secara langsung dalam berbagai tahapan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Prinsip-prinsip utama yang harus diterapkan dalam tata kelola pemerintahan meliputi kepastian hukum sebagai landasan operasional, keteraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pengutamaan kepentingan umum. Selain itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat, penerapan asas proporsionalitas, profesionalitas dalam pelaksanaan tugas, akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, serta efektivitas dan efisiensi dalam setiap proses operasional menjadi elemen penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan tata kelola Bumdes yang baik. Hal tersebut dapat terwujud jika didukung oleh Kepala Desa dan perangkat Desa (Susanti, Syairozi, & Lukman, 2021)

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan juga dapat menentukan kemajuan suatu desa. Pembangunan desa bertujuan guna membuat masyarakat desa lebih sejahtera dan juga dapat menjamin kualitas hidup dari masyarakatnya serta sebagai antisipasi kemiskinan melalui kebutuhan dasar yang diusahakan untuk dapat dipenuhi, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, serta berlanjutnya dalam memanfaatkan sumber daya alam yang masih tersisa. Lingkup dari tataran pembangunan di desa, tidak luput oleh adanya peranan pemerintah desa, dikarenakan sangat terkait pada kondisi ekonomi masyarakat yang mana sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar (Suprojo, 2019).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharap mampu menjadi alternatif pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Sesuai dengan Undang – Undang tersebut, peran pemerintah adalah menampung kekuatan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyumbang dukungan lewat badan usaha yang bisa menggerakkan perekonomiannya. (Suranny, 2021).

Kabupaten Sidoarjo termasuk wilayah orde 2 (dua) begitu identiknya dengan kemajuan wilayahnya pasalnya sangat dekat dengan Ibu Kota Provinsi dan letaknya dijalur utama. Nilai PAD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa kemajuan yang pesat dengan menempati urutan 2 (kedua) tertinggi setelah Kota Surabaya. Namun dalam perkembangannya, di wilayah Kabupaten Sidoarjo juga terdapat kesenjangan antara wilayah timur dan barat. Perkembangan wilayah timur dapat berjalan lebih cepat sebabnya dilalui jalan arteri primer yang menghubungkan Ibu Kota Provinsi dengan wilayah lainnya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Simo Djojo Makmur dari Desa Simoketawang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo termasuk masih aktif. Desa tersebut dikenal sebagai penghasil olahan makanan dari komoditas buah kelengkeng. Citra yang terlekat pada desa ini tercipta melalui program satu rumah satu kelengkeng hingga kini desa itu masih dijadikan tempat wisata lokal.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Simo Djojo Makmur yang baru diresmikan pada tahun 2021 oleh Bupati Sidoarjo termasuk dalam Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) yang masih baru resmi berjalan sehingga masih perlu membutuhkan banyak bantuan serta peranan Pemerintah Desa dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan serta tujuan dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini bertujuan guna meningkatkan keuangan Pemerintah Desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Simo Djojo Makmur itu sendiri berbagai bidang unit usaha antaranya: penyewaan, pelayanan umum, pelayanan jasa, usaha bersama, perdagangan, dan keuangan (Peraturan Desa Simoketawang Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) Desa Simoketawang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)

Keikutsertaan BUMDes dalam penggerakan ekonomi dapat menjadikan Desa Simo Ketawang sebagai desa yang berpotensi, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berkomitmen untuk mencapai ini melalui pembentukan brand dengan menanam kelengkeng, menciptakan Simo Joyo Cafe sebagai destinasi pariwisata, dan memberikan layanan pembayaran rekening listrik, pajak bumi bangunan, serta pengiriman jasa.

Ditegakkannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasar atas kebutuhan juga kekuatan desanya. Dalam rencana dan pendirian, atas persetujuan masyarakat setempatlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibangun, berdasarkan prinsipal koperasi, partisipatif, transparan, emansipatoris, akuntabel, juga berkelanjutan yang bermekanismekan anggota dan swadaya. Oleh sebabnya perlunya kesungguhan diharapkan terjadi agar badan usaha terkelola dengan baik (Trisnawati, Wahyono, & Wardoyo, 2018)

Di Desa Simoketawang, upaya pemasaran untuk objek wisata kelengkeng terbatas pada promosi dari mulut ke mulut tanpa adanya strategi pemasaran digital atau kerjasama dengan agen perjalanan yang dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan jumlah pengunjung. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan untuk pengembangan BUMDesa juga menjadi masalah, karena proses pembuatan kebijakan sering kali hanya melibatkan beberapa tokoh masyarakat, sementara mayoritas anggota masyarakat tidak diberi

kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka, yang menyebabkan keputusan yang diambil tidak selalu mencerminkan kebutuhan komunitas secara keseluruhan. Selain itu, kualitas SDM di BUMDesa Simo Djojo Makmur masih rendah karena staf operasional memiliki latar belakang pendidikan yang kurang memadai dan tidak mendapatkan pelatihan formal, sehingga mereka menghadapi kesulitan dalam mengelola administrasi dan operasional usaha secara efektif. Ketiga masalah ini saling berkaitan dan menghambat efektivitas pengembangan BUMDesa, serta berpotensi mengurangi kontribusi wisata kelengkapan terhadap pendapatan desa.

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah memberdayakan komunitas masyarakat dari tahap persiapan, tahap (evaluasi), tahap perancangan program, tahap perumusan program, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan fase akhir. Dalam tahapan ini masyarakat dilibatkan secara langsung agar masyarakat dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri hingga menjadi mandiri. Karenanya pemerintah desa paham atas status desa dengan menyelurahi. Seputar inisiatif badan desa untuk melaksanakan pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peran pemerintah desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Simo Djojo Makmur di Desa Simoketawang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan kualitatif, yang dikenal juga sebagai metode interpretatif atau artistik, digunakan untuk menggali informasi dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konsep, tindakan, persepsi, dan isu-isu terkait dalam konteks pengelolaan BUMDes dengan cara yang tidak terlalu terstruktur dan lebih bersifat interpretatif. (Ningtyas, 2018)

Subjek penelitian dalam studi ini terdiri dari beberapa kelompok penting. Pertama, pemerintah desa, termasuk kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan musyawarah desa, yang memberikan pandangan mengenai peran mereka dalam

pengembangan BUMDes. Kedua, masyarakat desa, terutama mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BUMDes, untuk memahami persepsi dan keterlibatan mereka dalam program-program BUMDes. Ketiga, pengelola BUMDes, meliputi manajer dan staf operasional yang memiliki informasi tentang pelaksanaan dan manajemen BUMDes. Terakhir, pihak ketiga seperti Agen BNI46 dan perguruan tinggi yang berkolaborasi dengan BUMDes, untuk memperoleh pandangan eksternal tentang kerjasama yang terjalin.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa teknik. Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas sehari-hari BUMDes serta interaksi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pengelola BUMDes. Wawancara mendalam dilakukan dengan subjek penelitian untuk menggali informasi tentang peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes dan evaluasi keberhasilan program tersebut. Selain itu, studi dokumen dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen resmi seperti laporan keuangan, dokumen perencanaan, dan catatan administrasi BUMDes untuk memperoleh data yang relevan.

Miles, Huberman, dan Saldana (2014) membuat model interaktif untuk analisis data kualitatif, yang digunakan untuk memeriksa data dari studi dokumen, observasi, dan wawancara. Pengumpulan, reduksi, penyajian, dan pengambilan kesimpulan data merupakan langkah-langkah dalam proses analisis data ini. Penyaringan data yang relevan untuk menemukan tren dan tema merupakan proses reduksi data. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang mendetail untuk mempermudah interpretasi. Akhirnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, memastikan bahwa analisis dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga data mencapai titik jenuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tentu saja hal ini sangat penting dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar BUMDes dapat dikelola secara efektif dan terhindar dari penyimpangan atau kesalahan yang tidak diinginkan. Dalam penelitian tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini, penulis menggunakan indikator-indikator

sebagai berikut: kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Berikut ini informasi yang penulis kumpulkan dan olah menjadi data yang dapat digunakan dalam penelitian ini:

1. Kooperatif

Tahap pertama dalam pengelolaan Badan Koperasi merupakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini berarti bahwa seluruh anggota tim pengelola BUMDes harus mendukung dan berkontribusi dalam pengembangan BUMDes, baik diminta maupun tidak. Dinyatakan bahwa penerapan konsep kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata oleh BUMDes, yaitu antara BUMDes dengan masyarakat setempat, efektif dalam mengelola industri pariwisata. Perguruan tinggi merupakan salah satu pihak yang dilibatkan dalam kerja sama ini yang saling menguntungkan. (Elsi, Bafadhal, & Rahman, 2020) Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Simoketawang bahwa BUMDes Simo Djojo Makmur aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk institusi akademis. Salah satu contoh terbaru dari kolaborasi ini adalah kemitraan dengan Universitas 17 Agustus Surabaya. Dalam kerja sama ini, pihak universitas memberikan bantuan dalam mendesain dan menata rumah produksi untuk pengolahan kelengkeng serta membantu dalam pengembangan produk olahan kelengkeng. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik dari wisata kelengkeng yang ada di desa. Seiring dengan berjalannya waktu, wisata kelengkeng ini terus mengalami perkembangan dan perubahan, dengan harapan bahwa pengunjung yang datang akan meningkat secara signifikan. Dengan fasilitas yang telah disediakan dan perencanaan yang matang, diperkirakan bahwa dalam waktu dekat jumlah pengunjung akan melebihi 100 orang per hari, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan keberhasilan usaha wisata kelengkeng di masa depan.

Prinsip koperasi dalam pengelolaan BUMDes Pariwisata Kelengkeng bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dengan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki hubungan kerja yang positif untuk memastikan proyek selesai dengan benar. Bagi para pemangku kepentingan atau pihak luar yang bekerja sama dengan BUMDes dalam pertumbuhan perusahaan, kepercayaan merupakan hal yang

penting dalam konsep koperasi. BUMDes Simo Djojo Makmur telah berhasil menerapkan kolaborasi yang efektif untuk pertumbuhan dan keberlangsungan usahanya. Dalam pengelolaan BUMDes apakah masyarakat dan pegawai bumdes sudah melakukan kerja sama sesuai dengan tujuan pengelolaan. Jika adanya kerja sama antara masyarakat dan staff bumdes maka pengelolaan dibumdes Simo Djojo Makmur tersebut akan berjalan dengan lancar, Namun saat ini masih ada masyarakat yang tidak mau ikut bekerja sama dalam pengelolaan Bumdes. Selanjuta mengajukan pertanyaan mengenai “

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan mengenai indikator Kooperatif diketahui bahwa kunci dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlunya kerjasama antar pegawai dan tokoh masyarakat agar komponen yang sudah dirancang bisa terlaksana sesuai yang diharapkan, namun masih juga terdapat masyarakat yang tidak mau ikut dalam kerja sama, maka pihak bumdes melakukan upaya dengan cara turun dan menjelaskan secara langsung kepada masyarakatnya. Dari penjelasan pemaparan tentang indikator diatas, dalam Pengelolaan Bumdes ini penulis menarik kesimpulan bahwa sudah diterapkan jalinan kerja sama antara staf Bumdes dan pihak masyarakat, dimana pihak staf Bumdes akan langsung turun dan mensosialisasikan mengenai pengelolaan Bumdes agar masyarakat mengetahui dan alhasil masyarakat terlibat dalam simpan pinjam Bumdes Simo Djojo Makmur yang sudah dirancang jauh- jauh hari. Dengan demikian keberhasilan buat staf Bumdes untuk mengajak warga masyarakat terkhususnya desa Simoketawang

2. Partisipatif

Pada tahap kedua pengelolaan Bumdes Simo Djojo Makmur di Desa Simoketawang, semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Bumdes secara sukarela memberikan bantuan dan kontribusi tanpa diminta dalam rangka memajukan Bumdes Simo Djojo Makmur. Menurut Afifa (2018), semua peserta BUMDes harus bersedia menjadi relawan atau diminta untuk memberikan bantuan dan kontribusi yang dapat mendorong pertumbuhan perusahaan BUMDes. BUMDes Desa Simoketawang juga mengikuti prinsip partisipatif dalam pengelolaannya, sebagaimana ditunjukkan oleh kesediaan mereka

untuk mempertimbangkan saran atau pemikiran yang berkaitan dengan topik ini. Peneliti dan staf BUMDes membahas prinsip partisipatif dalam wawancara berikut. Temuan wawancara menunjukkan bahwa masyarakat juga memberikan ide untuk perencanaan BUMDes ke depan sebagai cara untuk mendukung kontribusi relawan untuk BUMDes. Berdasarkan pemahaman tersebut dan hasil wawancara dengan narasumber, peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes di Desa Simoketawang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, telah menjunjung tinggi asas partisipatif dalam pengelolaannya, artinya usaha BUMDes diharapkan dapat berkembang atas dasar ide masyarakat atau pihak-pihak yang terkait. Asas partisipatif adalah semua atau seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharapkan dapat memberikan sumbangan, baik berupa masukan maupun ide secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes.

Beberapa ilmuwan telah berkunjung ke Desa Simoketawang dan membantu penelitian untuk menghasilkan beberapa kultivar buah lengkung. Lengkung merupakan komponen umum dalam makanan olahan seperti kopi dan sirup. Sejak tahun 2017, Bumdes telah bertugas dalam Pengelolaan Usaha Lengkung. Skema pengembangan yang direncanakan akan dimulai tahun depan ini menghendaki penanaman minimal satu pohon lengkung di setiap rumah tinggal. Bumdes akan menyumbangkan lahan siap tanam seluas 1 hektare. Nantinya, akan ditanam 200–250 bibit pohon lengkung di lahan tersebut. Sasaran ke depannya adalah peningkatan potensi ekonomi desa. Pemerintah Desa bekerja sama dengan Universitas 17 Agustus Surabaya membentuk lembaga Asuhan Mandiri (Asman). Ibu-ibu dari berbagai suku Asman memanfaatkan buah kelengkeng untuk membuat berbagai macam olahan. Diharapkan dukungan pemerintah ke depannya akan mempermudah pengurusan perizinan perusahaan, termasuk pemberian merek dagang pada produk Bumdes Wisata Kelengkeng Desa Simoketawang.

Menurut pandangan penulis, agar pengelolaan Bumdes berjalan lancar, indikator Partisipatif perlu digunakan dengan baik. Berdasarkan penjelasan faktor-faktor yang disebutkan, penulis menyimpulkan bahwa

keterlibatan masyarakat Desa Simoketawang dalam Bumdes Simo Djojo Makmur termasuk dalam kategori keterlibatan masyarakat yang aktif. Hal ini dibuktikan dengan adanya partisipasi masyarakat secara sukarela. Masyarakat terlibat aktif dalam program dan kegiatan Bumdes Simo Djojo Makmur tanpa adanya paksaan karena mereka yakin bahwa keberadaan lembaga ini bermanfaat dan telah meningkatkan kesejahteraan mereka.

3. Emansipatif

Emansipatif yaitu keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan suku maupun agama. Terkait dengan hal ini penulis mengajukan pertanyaan kepada Yatino selaku Komisariss dan Kepala Desa Simoketawang, Tanggal 21 Februari 2024, Jam 19:00 dengan pertanyaan “ Menurut bapak Apakah seluruh komponen Bumdes yang terlibat didalam pengelolaan Bumdes sudah diberlakukan secara seimbang. Sehubungan dengan hal itu maka penulis mengajukan pertanyaan “Kemudian dalam pengelolaan Bumdes Simo Djojo Makmur apakah pegawai staf Bumdes tidak membedakan suku atau ras masyarakat desa Simoketawang yang ingin bergabung dalam Bumdes seperti ingin melakukan simpan pinjam. Berdasarkan hasil temuan peneliti, banyak perempuan yang turut berpartisipasi dalam BUMDes di Desa Simoketawang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo sendiri. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti terkait topik tersebut. Dalam wawancara berikut, tim peneliti BUMDes membahas tentang konsep emansipatoris dan menyatakan bahwa perempuan merupakan tujuan dan sasaran utama BUMDes Simo Djojo Makmur. agar mereka mendapatkan perlakuan yang sama, dihargai, dan tidak direndahkan.

Berdasarkan keterangan informan, kondisi BUMDes di Desa Simoketawang digambarkan sebagai berikut. BUMDes memiliki pendapat masing-masing dan mengutamakan keterlibatan perempuan dalam pengelolaan BUMDes agar perempuan dapat tumbuh dan berkembang serta tidak terpinggirkan.

Tentu saja, mengutamakan perempuan dengan alasan pemberdayaan melanggar asas emansipatoris yang menyatakan bahwa semua faktor

harus seimbang tanpa membedakan jenis kelamin, golongan, ras, dan agama. Pada tahun 2022, Indhawati dan Widiyarta Peneliti menyimpulkan bahwa BUMDes di Desa Simoketawang tidak menganut asas emansipatoris karena lebih mengutamakan kelompok tertentu, khususnya perempuan, dalam mengelola organisasi.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan mengenai indikator Emansipatif diketahui bahwa masih adanya perlakuan yang tidak seimbang terhadap masyarakat yang ingin bergabung kedalam Bumdes. Dari penjelasan dan pemaparan tentang indikator diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan Bumdes tidak ada yang membedakan suku dan ras semuanya harus diperlakukan dengan seimbang.

4. Transparan

Tujuan dari asas keterbukaan adalah memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat tentang anggaran daerah. Karena BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang terbuka dan jujur di desa, maka pengelolaannya pun harus terbuka dan jujur. Pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan yang efektif adalah untuk melihat efektivitas BUMDes yang dikelola agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai.

BUMDes Simo Djojo Makmur menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) setiap enam bulan yang memuat data program keuangan dan ketenagakerjaan. Setiap tindakan yang telah dilakukan oleh BUMDes dievaluasi dalam laporan pertanggungjawaban Simo Djojo Makmur, mulai dari pengurus yang mengajukan penawaran untuk setiap tugas hingga pengeluaran kas. Tujuan dari laporan pertanggungjawaban adalah untuk membantu para pemangku kepentingan dalam membuat pilihan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, tujuan dari laporan pertanggungjawaban yang dilakukan dua kali dalam setahun adalah untuk mengetahui kondisi terkini BUMDes. Pemerintah Desa Simoketawang dan BPD RT/RT merupakan warga masyarakat yang terlibat dalam upaya ini. Hal ini juga diperkuat oleh Direktur Utama BUMDes, Simo Djojo Makmur yang menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban yang melibatkan warga, RT/RW, BPD, dan seluruh

perangkat desa, dilakukan setiap enam bulan sekali. Apabila ada pihak luar yang ingin mengetahui LPJ tersebut, kami juga siap menyampaikannya kepada masyarakat. Masyarakat memiliki akses informasi keuangan Bumdes yang paling lengkap karena sifatnya yang terbuka. Selain itu, masyarakat juga memiliki keleluasaan untuk mengakses informasi mengenai pelaksanaan dan penyusunan rencana kegiatan di Bumdes Makmur Simo Djojo.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator Transparan diketahui bahwa sifat keterbukaan dalam pengelolaan Bumdes Simo Djojo Makmur dijalankan dengan semestinya. Dari paparan indikator diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa Sifat Keterbukaan harus diterapkan saat mengelola Bumdes agar semuanya tau antara pegawai Bumdes dan masyarakat setempat apa saja yang di rancang dan apa saja yang akan dilakukan, disini tidak ada unsur tertutupan semuanya harus benar- benar sangat jelas.

5. Akuntabel

Transparansi, keterbukaan laporan keuangan, dan akuntabilitas kepada pemerintah desa dan masyarakat merupakan aspek dari konsep akuntabilitas. Masyarakat berhak melihat catatan laporan keuangan yang digunakan BUMDes untuk mengelola wisata Kelengkeng sebagai bagian dari akuntabilitas dasar pelaporan keuangan. BUMDes Simo Djojo Makmur telah mengadaptasi dan menjalankan pendekatan akuntabilitas ini dalam pengelolaan ekowisata. Sesuai dengan pedoman Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, BUMDes Simo Djojo Makmur menyelenggarakan pencatatan laporan keuangan atas perkembangan ekowisata yang dilaporkan dua kali setahun pada unit usaha ekowisata. Selain itu, Kepala Unit Direktur bertanggung jawab terhadap BUMDes melalui koordinasi internal.

Hal ini tentunya akan memudahkan untuk memahami perkembangan industri pariwisata dengan melihat hasil tugas dan kewajiban yang telah dilaksanakan. Respon tersebut sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pertanggungjawaban, sehingga Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDes Simo Djojo Makmur senantiasa menjadi acuan dalam

melaksanakan tugas dan kewajiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes melalui sektor pariwisata dapat dipertanggungjawabkan secara finansial. Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Simo Djojo Makmur menegaskan, untuk pelaporan keuangan sudah menggunakan sistem pembukuan keuangan (Akuntansi) yang baku seperti Neraca, Laba Rugi, buku pembantu, daftar inventaris kasir, dan lain-lain, sehingga mudah dipahami bagaimana kondisi keuangan dan kesehatan BUMDes. Berdasarkan kondisi keuangan BUMDes tahun 2022–2023, total pendapatan perusahaan mencapai Rp32.778.720.500,00 dan beban Rp21.312.612.525,00 sehingga laba yang diperoleh mencapai Rp11.446.107.975. Namun pada tahun 2023, pengeluaran sebesar Rp21.525.478.405, dan total pendapatan yang terkumpul sebesar Rp43.256.606.100, sehingga laba yang diperoleh sebesar Rp21.731.127.695. Dari data laporan laba rugi di atas terlihat bahwa pendapatan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator Akuntabel diketahui bahwa didalam Bumdes Simo Djojo Makmur mengenai dana masih kekurangan modal dana yang menjadi salah satunya penghambat yang besar, sebetulnya butuh dana lagi. Dari penjelasan dan pemaparan tentang indikator diatas maka dapat disimpulkan bahwa dana yang ada pada Bumdes Simo Djojo Makmur semua sudah jelas karena semua anggaran yang masuk ataupun keluar selalu di rekap dan akan dibuat laporan yang nantinya akan di sosialisasikan kepada masyarakat yang bergabung di Bumdes Simo Djojo Makmur tersebut.

6. Sustainable

Peneliti berpendapat bahwa BUMDes Simoketawang di Pariwisata Kelengkeng telah berhasil mendongkrak pendapatan awal desa sesuai dengan konsep keberlanjutan. Pengembangan pariwisata jangka panjang telah menjadi tujuan pengelolaan BUMDes Simo Djojo Makmur di pariwisata Kelengkeng. Pengelolaan ini merupakan salah satu cara untuk melestarikan potensi Desa Simoketawang yang harus dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cara pengelolaan tempat wisata tersebut menunjukkan seberapa baik Prinsip Berkelanjutan telah digunakan. Inovasi yang selalu diciptakan dan

didukung oleh infrastruktur dan amenitas yang dimiliki tempat wisata menjadi alasan kenaikan kunjungan setiap tahunnya (Izmi & Prathama, 2023) Pada tahun 2022, wisatawan yang berkunjung sebanyak 5.309 orang, dan pada tahun 2023 jumlah tersebut naik menjadi 6.954 orang. Data ini memenuhi standar untuk mendukung pengelolaan BUMDes yang berkelanjutan. Melihat jumlah pengunjung yang terus meningkat setiap tahunnya, tentu saja fasilitas yang disediakan pengelola yang terus ditingkatkan turut menambah kenyamanan dan keinginan pengunjung untuk kembali lagi ke Wisata Kelengkeng. Komentar dari staf Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Simo Djojo Makmur bahwa inovasi harus terus dilakukan karena jika tidak berinovasi maka pengunjung tidak akan datang untuk mendukung hal tersebut. Selain itu, dilakukan pula metode pemasaran yang memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, YouTube, dan website untuk mempromosikan wisata.

Indikator Berkelanjutan menunjukkan bahwa BUMDes Simo Djojo Makmur semakin hari semakin berkembang, menurut pengamatan penulis. Mengingat BUMDes diharapkan mampu menjadi penopang dan penggerak perekonomian Desa Simoketawang, maka dari penjelasan pemaparan indikator di atas terlihat bahwa BUMDes sangat diharapkan untuk terus dikembangkan dan dipelihara.

Keberadaan BUMDes dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Wisata Kelengkeng oleh BUMDes Simo Djojo Makmur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa sudah dilakukan dengan baik. Secara empiris, BUMDes ini menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes dengan efektif.

Pertama, prinsip kooperatif telah diterapkan dengan baik melalui kerjasama antara BUMDes, pemerintah desa, masyarakat, serta pihak ketiga seperti Agen BNI46 dan perguruan tinggi. Kedua, prinsip emansipatif diadopsi dalam berbagai aspek,

mendukung pemberdayaan masyarakat. Ketiga, prinsip akuntabilitas tercermin dari laporan keuangan dan administrasi yang rutin dilaporkan setiap dua kali dalam setahun. Keempat, prinsip keberlanjutan dijalankan dengan baik melalui pemasaran dari mulut ke mulut yang meningkatkan kunjungan wisatawan serta keterlibatan masyarakat desa yang turut mengelola wisata kelengkeng. Kelima, prinsip partisipatif terlihat dari dukungan pemerintah dan masyarakat, meski terdapat tantangan dalam sumber daya manusia yang masih terbatas. BUMDes bersama pemerintah desa terus memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM. Keenam, prinsip transparansi diterapkan dengan baik melalui penyampaian informasi kegiatan keuangan yang jelas dan mudah diakses oleh pemerintah desa dan masyarakat

REFERENCES

- Ayuningtyas, D. D., & Wibawani, S. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 281–286.
- Elsi, S. D., Bafadhal, F., & Rahman, R. (2020). Inovasi Kebijakan Publik Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 71–76.
- Ihsan, A. N., & Setiyono, B. (2018). Analisis pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) gerbang lentera sebagai penggerak desa wisata lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 221–230.
- Indhawati, A., & Widiyarta, A. (2022). Pengembangan Objek Wisata Lontar Sewu oleh Bumdesa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 152–157.
- Izmi, D. S., & Prathama, A. (2023). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Bumdes. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 329–336.
- Jumaiyah, J., Wahidullah, W., Hidayat, S., Hidayat, S., Mudiarti, L., & Aliyah, S. (2019). Manajemen Pengelolaan Bumdes Mandiri Sejahtera. *Selaparang*, 3(1), 117–119.
- Ningtyas, A. P. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Aset Badan Kredit Desa Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 1–18.
- Prastiwi, J. H., & Ulfah, I. F. (2022). Dinamika Politik Dalam Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes: Studi Pada Tiga BUMDes Terbaik Jawa Timur. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8(1), 78–95.
- Suranny, L. E. (2021). Pengembangan potensi desa wisata dalam rangka peningkatan ekonomi perdesaan di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Litbang Sukowati*, 5(1), 49–62.
- Susanti, I., Syairozi, M. I., & Lukman, H. Y. W. (2021). Analisis Sistem Manajemen Dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Bluluk. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 701–710.
- Trisnawati, A. E., Wahyono, H., & Wardoyo, C. (2018). *Pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal*. State University of Malang.